

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kementrian Agama In Word.
<https://lajnah.kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022.

BUKU

- Abdurrahman, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- al-Asfahani, Ragib. al-Mufradat fi Garib al-Qur'an, Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.
- al-Ashfahani, Al-Raghib. al-Mu'jam al-Mufradat li al-Fazh al-Qur'an, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- al-Baqi, M. Fuad Abdul. Mu'jam Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim. Kairo: Daarul Kutib, 1942.
- al-Gazali, Abdu ar-Rahman, Et.al. Fikih Muamalat. Jakarta: Kencana, 2010.
- al-Maliki, Abdu ar-Rahman. Politik Ekonomi Islam. Bogor: al-Azhar Press, 2009.
- al-Maliki, Abdurrahman. As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla, terjemah Ibnu Sholah, Politik Ekonomi Islam. Bangil: al-Izzah, 2001.
- Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah. Beirut: Dar al-Kothob, 1985.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. as-Syakhshiyyah al-Islamiyyah Juz II, Cetakan V. Beirut: Daar al-Ummah, 2003.
- Baiquni, Ahmad. al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan Kealam. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Bakhrul Amal, *Pengantar Hukum Tanah Nasional Sejarah, Politik, dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Bidara, Olden. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak Dalam Teori Dan Praktek Pemerintahan, Dalam Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.
- Bukhari, Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail. Shohih Bukhari, Cetakan Ke-1. Kudus: Syirkah al-Kudus, 2014.
- Chomzah, Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Gunung Agung, 2002.

- Fathurrahman Azhari, *Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Hajati, Sri, Agus Sekarmadji, Sri Winarsi dan Oemar Moechthar, Politik Hukum Pertanahan Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021.
- Hamzah, Andi. Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Harahap, Zairin. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo, 2005.
- Haroen, Nasrun. Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harsono, Boedi . Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Hermit, Herman. Cara Memperoleh Sertifikat Tanah hak Milik Tanah Negara Dan Tanah Pemda. Bandung : Mandar Maju, 2004.
- Horoen, Nasrun. Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Huda, Nurul, Et.al. Keuangan Publik Islam (Pendekatan Teoritis dan Sejarah). Jakarta: Prenada, 2012.
- Indrajaya, Rudi, Emelia Kontesa dan Rizkika Arkan Putera Indrajaya, Pengantar Hukum Agraria Teori dan Praktik. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Iskandar, Mudakir . Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Sumber Konflik Pertanahan, cet.1. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014.
- Mahasari, Jamaluddin. Pertanahan dalam Hukum Islam. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Mahmud Ibrahim al-Khatib, al-Nizam al-Iqtisadi, lihat Rafiq Yunus al-Misri, *Usul al-Iqtisadi al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1993), Bandingkan dengan, Muhammad Baqr Sadr, *Iqtisaduna*, (Bairut: Dar al-Ta'rif lil al-Mathbuat, 1981).al-Misri, Rafiq Yunus. *Usul al-Iqtisadi al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1993.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Munawir, Ahmad Warson. Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Nugraha, Safri, Anna Erliyana, Et.al. Hukum Administrasi Negara. Ed. Revisi. Depok: CLGS Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Parlindungan, AP. Komentar Undang-Undang Pokok Agraria, Cetakan IX. Bandung: Mandar Maju, 2008.

- Perangin, Effendi. Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah, Cetakan Ke-3. Jakarta : CV.Rajawali, 1992.
- Perangin, Effendi. Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Cet. Ke-4. Jakarta: Rajawali, 1994.
- Pratiwi, Cekli Setya Shinta, A.P, Fauzi, dan Christina Y.P, Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: LeIP, 2016.
- Qol'ahji, Rowwas dan Mu'jam Lughoti al-Fuqoha, Cetakan ke II. Beirut: Daar an-Nafais, 1988.
- Sangsun, Florianus SP. Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007.
- Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Cet. 2. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Sinamo, Nomensen. Hukum Admininstrasi Negara. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Suntana, Ija. Politik Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Tjandra, W. Riawan. Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'an, Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam al-Qur'an*, Cet Ke-3. Jakarta: Piramida, 2005.
- Ya'qub, Abu Yusuf. Tahqiq wa Ta'liq. Muhammad Ibrahim al-Banna. Kitab al-Kharaj. Mesir: Dar al-Islah, 1981.

JURNAL

- Andi Bustamin Aeng Kunu, "Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah", *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No.1 Januari-April 2012. hal. 9.
- Budi Rahayu, "Pelaksanaan Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Negara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri", *Dinamika Hukum: Jurnal*, Vol. 6, No. 2, Juni 2015, hal. 53.
- Fajri, Ahmad. Ahmad Djalaluddin, dan Siswanto, "Pengelolaan Aset Tanah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang". *Islamic Economics Qoutient: Jurnal*. Vol.1 No.2 Mei-Juni 2018, hal. 13.

- Freddy Putera Husein, Lastuti Abu Bakar dan Nanda Anisa Lubis, “Kepastian Hukum Penerapan Jangka Waktu Perpanjangan Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Masa Berlakunya Sebagai Obyek Hak Tanggungan Sebelum Perjanjian Pokok Berakhir Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”, *Acta Diurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, Vol. 2, No. 1, Desember 2018. hal 99.
- Idrus, Achmad Musyahid. “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih “Tasarruf al-Imam Manutun Bil Maslahah””. *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 10, No. 2, Desember 2021, hal. 3.
- Riza, Muhammad. “Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar bin Khattab RA”. *Jurnal-Ebis* Vol. 2, No.2, 2016. hal. 12-13.
- Santosa, Budi. Purbayu dan Awaril Muttaqin, Aris. “Mashlahah Dalam Pajak (Telaah Terhadap Kitab al-Kharaj)”, *Dinamika Ekonomi dan Bisnis: Jurnal*. Vol.12, No.2, 2015. hal. 122.

KARYA TULIS

- Astuti, Widi. “Peralihan Hak Jual Beli Atas Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya Dengan Pengajuan Proses Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah”, (*Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2011*), hal.21.
- Famulia, Ledy. “Konsep AL-Iqta Dalam Fikih dan Relevansinya Dengan Redistribusi Tanah di Indonesia Pasca Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013”, (*Skripsi Fakultas Hukum Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016*), hal. 43.
- Hasan, Tholhah. “Pertanahan Dari Perspektif Agama Islam dan Budaya Muslim Menuju Pembangunan Indonesia Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan” (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pertanahan: Pemberdayaan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Agama, dan Budaya, Yogyakarta, 25 Februari 1999), hal. 90.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. “Kebijakan Negara Untuk Mengakui atau Tidak Mengakui Eksistensi Masyarakat Adat Berikut Hak Atas Tanahnya”, (Makalah disampaikan dalam diskusi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di Jakarta, tanggal 21 Oktober 1996).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Nomor 5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 Nomor 104, TLN Nomor 2043, LL SETNEG,

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah, PP Nomor 40 Tahun 1996 , LN Tahun 1996, LL Setkab.

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, PP Nomor 18 Tahun 2021, LN. 2021 Nomor 28, TLN Nomor 6630.

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, PP Nomor 24 Tahun 1997, LN Tahun 1997 Nomor 59.

Indonesia. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999.

Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, PMNA/KBPN RI Nomor 18 Tahun 2021, BN Tahun 2021 Nomor 1202.

Indonesia. Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional, PERPRES Nomor 48 Tahun 2020, LN Tahun 2020 Nomor 84.

Indonesia. Peraturan Menteri Nagera Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 51 Tahun 2009, LN 2009 Nomor 160, TLN Nomor 5079, LL Setneg: 23.

Indonesia. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomot 30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 292, TLN Nomor 5601.

Indonesia. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, PERKBPN Nomor 2 Tahun 2013.

Indonesia. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 5076.

Indonesia. Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 3 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 3, TLN Nomor 4958.

PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 83 K/TUN /2021”.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. “Putusan Nomor 215/G/2019/PTUN-JKT”.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. “Putusan Nomor 154/B/2020/PT.TUN.JKT.”

INTERNET

Black, Henry Campbell, Black Law Dictionary. USA: West Publishing CO,
<https://thelawdictionary.org/>

Iffatin Nur dan Indri Hadisiswati, “Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Konteks ke Indonesia-an Perspektif Fiqih” (Diskusi Ilmiah Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung, 23 Mei 2014). <https://fasih.uinsatu.ac.id/>. Diakses pada tanggal 27 November 2022.